



DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Kerjasama Antara Anggota TNI dan Pemerintah Daerah Papua dalam Menangani Konflik di Papua

**Richard Arnold Yeheskiel Sangari**

Universitas Pertahanan, Sentul, Indonesia, [Richard.sangari@yahoo.com](mailto:Richard.sangari@yahoo.com)

Corresponding Author: [Richard.sangari@yahoo.com](mailto:Richard.sangari@yahoo.com)

**Abstract:** *The province of Papua has long been affected by conflicts involving political issues, autonomy, ethnic diversity, natural resources, and human rights. This conflict began during the colonial period and continued after Papua became part of Indonesia in 1945, particularly following the 1969 Pepera, which many Papua residents deemed unfair. Violence in Papua persists with numerous casualties, reflecting a severe security situation. Conflict management efforts involve synergy between the TNI and local government, with the TNI focusing not only on security but also on social and economic development. Collaboration between territorial apparatus and local government is expected to create stability but often faces challenges such as differing task perceptions and support for separatist groups. This study employs a qualitative research method with a case study approach, using interviews and literature review to gather data. The findings indicate that handling the conflict in Papua requires strategic measures, including increasing the presence of Satuan Komando Wilayah (Satkowil) at each administrative level, such as Kodim in districts and Koramil in sub-districts. Kodim and Koramil play a crucial role in maintaining security and supporting local development and community welfare. It is also important to map various types of conflicts—armed, communal, and social—and adopt appropriate approaches. Satkowil/Apter serves as a communication bridge between local government and the community, assisting in policy implementation and addressing conflicts proactively. Effective collaboration between territorial apparatus and local government is expected to enhance stability and progress in Papua.*

**Keyword:** *Human Resource Management, Conflict Management, Conflict Areas.*

**Abstrak:** Provinsi Papua telah lama dilanda konflik yang melibatkan isu politik, otonomi, keberagaman suku, sumber daya alam, dan hak asasi manusia. Konflik ini bermula pada masa kolonial dan berlanjut setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1945, khususnya pasca Pepera 1969 yang dianggap tidak adil oleh banyak warga Papua. Kekerasan di Papua terus berlanjut dengan banyaknya korban jiwa, yang mencerminkan situasi keamanan yang buruk. Upaya pengelolaan konflik melibatkan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah, dengan TNI tidak hanya berfokus pada keamanan tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi. Kolaborasi antara aparat teritorial dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan stabilitas tetapi sering menghadapi tantangan seperti perbedaan persepsi tugas dan dukungan terhadap kelompok separatis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan wawancara dan kajian pustaka untuk

mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan konflik di Papua memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk meningkatkan keberadaan Satuan Komando Wilayah (Satkowil) di setiap tingkat administrasi, seperti Kodim di distrik dan Koramil di kecamatan. Kodim dan Koramil memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting pula untuk memetakan berbagai jenis konflik—konflik bersenjata, komunal, dan sosial—serta mengambil pendekatan yang tepat. Satkowil/Apter berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, membantu dalam implementasi kebijakan dan menangani konflik secara proaktif. Kolaborasi yang efektif antara aparat teritorial dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan kemajuan di Papua.

**Kata Kunci:** Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Konflik, Daerah Konflik.

## PENDAHULUAN

Konflik Papua di Indonesia telah menjadi perhatian penting selama beberapa dekade, terkait dengan isu politik, otonomi, keragaman etnis, sumber daya alam, dan hak asasi manusia. Ketegangan meningkat setelah penyerahan kedaulatan ke Indonesia pada tahun 1969, yang dikenal sebagai Pepera (Undang-Undang Pendapat Rakyat). Eskalasi kekerasan di Papua telah menyebabkan sedikitnya 2.118 korban jiwa, dengan 1.654 orang terluka dan 464 lainnya kehilangan nyawa. Untuk mengatasi konflik tersebut, pentingnya sinergi antara aparat teritorial TNI dan pemerintah daerah menjadi sangat penting (Kossay, 2011). TNI memegang peran strategis dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, termasuk tugas-tugas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan konflik non-kinetik. Di Papua, TNI terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti pengamanan wilayah, penanganan konflik skala besar, dan dukungan kepada TNI serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Muridan, 2018).

Kerjasama TNI dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga daerah tetap aman, stabil, kondusif, dan sejahtera. Sinergi tersebut antara lain dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayapura, Pj. Triwarno, Komandan Kodim 1701/Jayapura, Kolonel Hendri Widodo, dan Kapolres Jayapura, AKBP Frederik yang berkoordinasi mengantisipasi terjadinya Aksi Demonstrasi Anarkis dalam Penyambutan Jenazah Almarhum Bapak Lukas Enembe pada tanggal 28 Desember 2023. Namun, peran TNI dalam penanganan konflik di Papua selama ini kerap kali menuai kontroversi akibat pelanggaran HAM dan kebijakan militer yang keras. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang cukup besar dalam penanganan konflik tersebut, namun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Penguatan konsep kerjasama TNI dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi Konflik Papua dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI (Pekey, 2018).

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerja sama antara Aparat Teritorial Kodam XVII Cendrawasih dengan Pemerintah Daerah di Papua dalam menangani konflik. Dibahas sejarah, ideologi, dan landasan ketatanegaraan Indonesia, khususnya wilayah Papua. Penjajahan Papua oleh kekuatan Eropa pada abad ke-19 membawa konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat Papua, termasuk meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial dan ekonomi, perubahan drastis dalam masyarakat Papua, dan konflik sosial yang mengakar. Pada awal abad ke-20, Belanda secara resmi mengklaim Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda, tetapi modernisasi ini juga menyebabkan konflik budaya, ketidakpuasan, dan perlawanan dari masyarakat Papua (Ponto, 2014). Keterbatasan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan menciptakan kesenjangan politik, yang semakin memanaskan konflik di Papua (Mabes TNI, 2018b). Gerakan perlawanan lokal muncul untuk menentang kolonialisme Belanda selama periode ini.

Penyerahan Papua ke Indonesia merupakan titik balik utama dalam sejarah konflik di wilayah tersebut. Belanda dan Indonesia sepakat untuk menyerahkan pemerintahan Papua kepada PBB selama satu tahun, tetapi pada tahun 1963, Indonesia secara resmi mengambil alih pemerintahan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang berujung pada gerakan kemerdekaan Papua Barat. Ketidakpuasan dan tuntutan kemerdekaan Papua Barat menjadi pendorong utama konflik yang terjadi di Papua (Ponto, 2014). Otonomi daerah yang diperkenalkan pada era reformasi memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih signifikan dalam menangani konflik di Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan otonomi khusus kepada Papua dan Papua Barat, yang memungkinkan mereka mengelola sumber daya, mengembangkan kebijakan, dan menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri.

Pancasila, ideologi nasional Indonesia, menjadi landasan nilai dan pandangan hidup bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi landasan bagi TNI dan Pemerintah Daerah dalam menangani konflik di wilayah Papua. Konsep ketahanan nasional Indonesia menekankan pada pembangunan kekuatan nasional melalui kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, selaras, dan harmonis dalam segala aspek kehidupan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen vital sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai alat penangkal berbagai ancaman militer dan bersenjata (Sesko TNI, 2024). Dalam menyelesaikan konflik di Papua, TNI memiliki tanggung jawab terkait dengan KKB, pemberontakan bersenjata, dan separatis bersenjata, serta memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan pemerintahan yang saling tumpang tindih antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dengan kewenangan Presiden terkait dengan upaya memelihara ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat persatuan berdasarkan keberagaman, dan mewujudkan kehidupan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur penambahan dan perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Pemerintah Provinsi Papua terdiri atas Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang dipilih melalui pemilihan umum dan harus berasal dari Orang Asli Papua. Konsep sinergi yang berasal dari kata Yunani "sinergi" mengacu pada usaha bersama atau "usaha kooperatif" yang inti prosesnya adalah kerja sama. Konsep ini diterapkan pada peran TNI, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya dalam menangani konflik di Papua, yang bertujuan untuk menciptakan solusi atau ide yang lebih baik dan inovatif melalui kerja sama yang kreatif dan efektif. Teori resolusi konflik dapat digunakan sebagai alat analisis dalam kerja sama antara Kodam XVII dengan Pemerintah Daerah Papua untuk menyelesaikan konflik. Dengan menggunakan teori ini, kerja sama antara Kodam XVII dan Pemerintah Daerah Papua dapat difokuskan pada upaya mengidentifikasi ketegangan yang ada, menyelesaikan konflik yang muncul, dan mencegah potensi konflik di masa mendatang melalui kebijakan yang tepat dan responsif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis konsep sinergi ideal antara Aparat Teritorial TNI dengan Pemerintah Daerah di wilayah Konflik Papua. Penelitian kualitatif difokuskan pada pengamatan fenomena secara mendalam, dengan fokus pada pemahaman makna peristiwa yang diteliti (Basrow & Suwandi, 2008). Penelitian deskriptif dilakukan untuk menentukan variabel independen tanpa membandingkan dengan variabel lainnya. Subjek penelitian memegang peranan penting dalam sebuah tesis ilmiah, yaitu menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan terarah digunakan dalam menentukan sumber data, meliputi perwakilan dari Kodam

XVII/Cendrawasih, Pemerintah Daerah di Papua, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Objek penelitian meliputi kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan Sinergi antara Kodam XVII/Cendrawasih dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

Teknik pengumpulan data mixed methods menggabungkan metode kualitatif, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh data yang diperlukan secara tertulis (Burhan, 2007). Wawancara mendalam digunakan untuk studi pendahuluan, sedangkan observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan proses biologis dan psikologis (Moleong, 2018). Studi dokumentasi berguna untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data primer dan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2014). Untuk menilai keabsahan data, digunakan teknik pemeriksaan dengan mempertimbangkan empat kriteria utama, yaitu: kepercayaan (credibility), kepindahan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Triangulasi sumber merupakan metode utama untuk memeriksa kebenaran data dari berbagai perspektif, memastikan keandalan dan keakuratannya.

Metode analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana digunakan dalam penelitian ini. Tiga komponen penting dalam teknik analisis data meliputi Proses Kondensasi Data, Proses Penyajian Data, dan Tahap Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan. Kesimpulan atau verifikasi ditarik untuk menjawab rumusan masalah penelitian, baik sebagai hipotesis maupun hubungan kausal (Sugiyono, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Wilayah Papua di Indonesia dikenal dengan keragaman geografis, kekayaan budaya, dan sumber daya alamnya yang melimpah. Wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis adat dengan bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang beragam. Perekonomian wilayah ini didominasi oleh sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan kayu, dengan tambang Grasberg sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Meskipun sumber dayanya kaya, Papua tetap menjadi salah satu wilayah paling terpencil di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan infrastruktur yang terbatas. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan terus dilakukan, tetapi kemajuannya lambat. Konflik di Papua dimulai dengan aneksasi Papua oleh Indonesia pada tahun 1969, tetapi ketidakpuasan terhadap integrasinya telah memperburuk situasi. Orang Papua juga merasa terpinggirkan secara budaya dan politik karena kebijakan transmigrasi pemerintah Indonesia, yang lebih menyukai asimilasi ke dalam budaya nasional Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus berperang melawan pemerintah Indonesia di Papua, yang mengakibatkan korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia.

Konflik di Papua juga melibatkan perang informasi dan propaganda, dengan media internasional dan organisasi hak asasi manusia melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan ekonomi. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menunjukkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan melalui program dan investasi infrastruktur, tetapi ini telah menciptakan trauma dan ketidakpercayaan yang mendalam di antara orang-orang Papua. Pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai seringkali sulit diakses, terutama di daerah-daerah terpencil. Upaya untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi belum signifikan, dan beberapa tokoh menghadapi ancaman, penangkapan, atau pengasingan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua, seperti jalan trans-Papua dan peningkatan layanan publik, belum cukup untuk mengatasi akar masalah.

Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dianggap kunci untuk mencapai perdamaian jangka panjang, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan.

Kodam XVII/Cendrawasih yang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas di Papua menghadapi berbagai tantangan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi medan serta geografis yang sulit. Peran aparat teritorial tetap krusial dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Papua. Pemerintah Daerah di Papua memegang peranan penting dalam menangani konflik, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Hal ini meliputi perluasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, serta perumusan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi khusus masyarakat Papua. Penguatan otonomi daerah dan kapasitas administrasi sangat penting bagi Pemerintah Daerah agar lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengelola pelaksanaan program pembangunan.

Optimalisasi peran Kodim dan Koramil tidak hanya memperkuat keamanan di Papua, tetapi juga mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana untuk memahami peran Pemerintah Daerah dalam menangani konflik di Papua. Penelitian ini melibatkan tiga komponen: kondensasi data, penyajian teks naratif, dan penarikan hubungan sebab akibat. Data yang dikumpulkan meliputi kebijakan dan peraturan daerah, program pembangunan sosial, kerja sama dengan pihak ketiga, dan respons terhadap insiden konflik.

Pemerintah daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan peraturan untuk menangani konflik dan menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Kebijakan tersebut meliputi peraturan keamanan, program pembangunan, dan strategi mitigasi konflik. Program pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketegangan sosial, sementara kolaborasi dengan pasukan keamanan, LSM, dan masyarakat lokal meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan konflik. Dalam menghadapi konflik, pemerintah daerah mengambil berbagai tindakan tanggap untuk mengatasi situasi darurat dan mengurangi dampaknya. Tindakan tersebut meliputi manajemen krisis, bantuan kemanusiaan, dan evaluasi pascakonflik untuk menentukan tindakan korektif dan upaya pemulihan jangka panjang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan di Papua, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung upaya stabilisasi.

Penelitian ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola situasi darurat dan mempercepat proses pemulihan. Konflik di Papua melibatkan aparat teritorial Kodam XVII/Cendrawasih dan pemerintah daerah, yang memiliki peran yang saling melengkapi. Analisis ini menggunakan teknik data kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara kedua entitas tersebut dan koordinasi serta kolaborasi mereka dalam pengelolaan konflik. Analisis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara kedua entitas tersebut dan upaya pengelolaan konflik mereka di Papua. Peran aparat teritorial dan pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik saling melengkapi, memastikan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk merumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat kerja sama antara aparat teritorial dan pemerintah daerah, dapat digunakan analisis SWOT.

Aparatur Teritorial Kodam XVII/Cendrawasih dan Pemerintah Daerah fokus pada penguatan kerja sama di Papua, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelatihan bersama tentang manajemen konflik, komunikasi efektif, dan teknik mediasi, serta pembentukan forum koordinasi terpadu. Sistem informasi bersama akan meningkatkan transparansi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Infrastruktur manajemen konflik yang memadai, termasuk Kodim di daerah rawan, pusat krisis, dan pusat koordinasi, juga akan menjadi krusial. Sistem transportasi dan penyimpanan yang efisien akan memastikan distribusi sumber daya tepat waktu. Inovasi dalam strategi manajemen konflik dan

pendekatan berbasis data akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala akan meningkatkan kemampuan beradaptasi dan tanggap terhadap dinamika konflik yang berubah. Meskipun ada beberapa kemajuan, kerja sama antara Kodam XVII/Cenderawasih dan Pemerintah Daerah Papua dalam menangani konflik di Papua masih menghadapi tantangan yang signifikan. Konsep kerja sama yang ideal antara TNI dan pemerintah daerah di Papua didasarkan pada prinsip saling percaya dan komunikasi yang terbuka, yang memungkinkan kedua belah pihak saling melengkapi peran dan keahlian masing-masing dalam menangani konflik dan pembangunan daerah.

Kodam XVII/Cenderawasih, sebagai kekuatan militer di wilayah Papua, bertanggung jawab untuk mengelola konflik dan menjaga keamanan di provinsi-provinsi tersebut. Sejak didirikan pada tahun 1964, Kodam XVII/Cenderawasih telah terlibat dalam berbagai aspek seperti keamanan, stabilitas, pembinaan teritorial, operasi militer selain perang (OMSP), pengumpulan intelijen, dan pendekatan humanis. Kehadiran aparat teritorial seperti Kodim dan Koramil sangat penting untuk respon cepat terhadap pertahanan keamanan dan integrasi antara upaya keamanan dan program pembangunan. Prinsip sinergi, yang melibatkan kerja sama dan penciptaan solusi inovatif, relevan dalam konteks peran Kodam XVII/Cenderawasih. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, memperkuat koordinasi antarpihak, dan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Di Papua, di mana konflik sering melibatkan berbagai elemen sosial dan politik, Kodam XVII/Cenderawasih berfungsi sebagai mitra keamanan dan strategis bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Kehadiran mereka di tingkat lokal memungkinkan interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat, yang penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Peran Kodam XVII/Cenderawasih dalam mengelola konflik di Papua telah dievaluasi menggunakan teori resolusi konflik, yang mengungkap dampak positif tetapi juga tantangan. Sinergi antara aparat teritorial dan pemerintah daerah telah berhasil mengidentifikasi ketegangan laten, menyelesaikan konflik permukaan, dan mencegah potensi konflik. Namun, tantangan ada dalam koordinasi, komunikasi, dan penyesuaian kebijakan. Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengelola konflik di Papua, yang memerlukan penyesuaian strategi dan perbaikan mekanisme koordinasi antara Kodam XVII dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di Papua memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi bagi masyarakat Papua. Dengan bekerja sama dengan berbagai aktor, seperti TNI, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, Pemerintah Daerah memastikan pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memfasilitasi dialog dan konsultasi yang inklusif antara pihak-pihak yang berkonflik, bertindak sebagai mediator dan memastikan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Penguatan otonomi daerah dan kapasitas administratif sangat penting dalam menangani konflik di Papua. Teori kerja sama sipil-militer memberikan kerangka untuk memahami bagaimana Pemerintah Daerah dapat berfungsi sebagai komponen kunci dalam pengelolaan konflik. Dalam kondisi damai, Pemerintah Daerah dan TNI berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan stabilitas sosial. Namun, ketika konflik meningkat, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan dan tantangan yang lebih kompleks, termasuk membentuk penghubung antara komponen sipil dan militer. Pemerintah Daerah juga memainkan peran strategis dalam menangani konflik di Papua, yang melibatkan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan dan manajemen konflik. Evaluasi dampak kerja sama sipil-militer menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanganan konflik di Papua, termasuk peningkatan efektivitas tanggapan terhadap masalah keamanan dan sosial, pemulihan dan pembangunan pascakonflik, penurunan

tingkat kekerasan, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Hubungan antara Kodam XVII/Cenderawasih dan Pemerintah Daerah di Papua didasarkan pada prinsip kerja sama sipil-militer yang sangat penting dalam pengelolaan konflik. Kerja sama ini melibatkan pembentukan struktur koordinasi yang mengintegrasikan komponen sipil dan militer, pemberian dukungan operasional dan keamanan, serta pengelolaan perencanaan kebijakan dan program pembangunan. Hubungan tersebut telah menunjukkan dampak positif pada stabilitas dan pembangunan, mengurangi tingkat kekerasan, memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Sesko TNI, 2024). Namun, beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan koordinasi dan komunikasi antara kedua entitas.

Pengelolaan konflik di Papua melibatkan penanganan ketegangan laten yang dapat memicu konflik yang lebih besar. Kodam XVII dapat mendukung Pemda dalam mendeteksi ketegangan ini secara dini melalui pengumpulan informasi dan pemantauan, sementara Pemda dapat mengidentifikasi dan menangani masalah sosial melalui kebijakan dan program daerah. Hubungan antara Kodam XVII dan pemerintah daerah sangat penting dalam menyelesaikan konflik di permukaan, seperti ketegangan antaretnis, sengketa tanah, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Untuk mencegah potensi konflik, Kodam XVII dan pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang responsif dan komprehensif yang mengatasi akar penyebab konflik. Pemantauan dan penilaian risiko yang berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Kodam XVII dan pemerintah daerah akan membantu dalam merumuskan kebijakan proaktif untuk mencegah potensi konflik.

Penilaian dan penyesuaian strategi secara berkala sangat penting bagi proses penyelesaian konflik di Papua. Hal ini meliputi pengumpulan data tentang dampak kebijakan, analisis efektivitas mediasi, dan pemberian umpan balik kepada masyarakat. Pendekatan berbasis evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi pembangunan di Papua (Ponto, 2014). Strategi penguatan kerja sama antara Aparat Teritorial Kodam XVII/Cendrawasih dan Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik di Papua berada pada Kuadran 2 (Strategi Dukungan Diversifikasi). Strategi utama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama, peningkatan koordinasi dan sistem informasi, penguatan infrastruktur dan logistik, serta inovasi dan penyesuaian strategi (Mabes TNI, 2018a).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk menangani konflik yang kompleks, karena memungkinkan koordinasi yang lebih baik, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya tanggap terhadap situasi yang berkembang (Bagyo, 1996). Evaluasi dan penyesuaian berkala berdasarkan masukan dan hasil sangat penting untuk memastikan bahwa kapasitas sumber daya manusia terus meningkat dan tetap relevan dalam menangani konflik di Papua. Peningkatan koordinasi dan sistem informasi sangat penting untuk koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif (Mabesad, 2020). Forum koordinasi terpadu yang melibatkan semua pihak terkait akan membantu menyelaraskan visi, menetapkan prioritas, dan merancang strategi untuk menangani konflik secara kolektif. Sistem informasi bersama akan memberikan pertukaran data yang akurat dan cepat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih berbasis data.

Penguatan infrastruktur dan sistem logistik sangat penting bagi strategi pengelolaan konflik, terutama di wilayah seperti Papua yang memiliki situasi yang kompleks. Investasi pada fasilitas seperti pusat krisis dan pusat koordinasi akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara militer dan pemerintah daerah (Mardikanto & Soebiato, 2018). Pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan respons yang adaptif dan efektif terhadap isu-isu yang muncul dalam pengelolaan konflik (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, 2015). Strategi terpadu yang menggabungkan aspek-aspek seperti keamanan, pembangunan ekonomi, dan layanan sosial sangat penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan

berkelanjutan (Tugas Bantuan TNI Kepada Pemda, 2011). Evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala merupakan bagian dari proses inovasi yang sedang berlangsung, yang membantu menilai efektivitas strategi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan (Samsudin, 2006).

## KESIMPULAN

Aparatur Teritorial Kodam XVII/Cendrawasih memegang peranan penting dalam pengelolaan konflik di Papua, menjaga ketertiban, serta memberikan bantuan keamanan dan kemanusiaan. Aparatur ini juga bertindak sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat setempat. Efektivitas peran ini bergantung pada faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang efektif, dan strategi berbasis data. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan tata kelola yang tidak efektif, menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan implementasi kebijakan. Untuk meningkatkan perannya, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas internal, memperbaiki mekanisme koordinasi, dan melakukan inovasi dalam perumusan kebijakan. Hubungan antara militer dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan dan mengurangi ketegangan. Penguatan kerja sama memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, sistem informasi, infrastruktur, logistik, dan inovasi dalam strategi pengelolaan konflik.

Rekomendasi dalam penelitian ini meliputi pembentukan tim kerja bersama, pengembangan sistem informasi terpadu, penyelenggaraan pelatihan bersama tentang manajemen konflik, dan penerapan model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Mereka juga mengusulkan pembentukan jaringan komunikasi berbasis masyarakat, penyelenggaraan pertemuan masyarakat secara berkala, dan evaluasi strategi manajemen konflik secara berkala. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat dan pendekatan berbasis kearifan dihormati.

## REFERENSI

- Bagyo, H. (1996). *Perang Abad 21 dan Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Basrow, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Predana Media Group.
- Kossay, P. (2011). *Konflik Papua: akar masalah dan solusi*. Tollelegi.
- Mabes TNI. (2018a). *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma*.
- Mabes TNI. (2018b). *Doktrin Teritorial Tentara Nasional Indonesia*.
- Mabesad. (2020). *Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Muridan. (2018). *Papua Road Map: Model Jangka Panjang Penyelesaian Konflik di Papua*. LIPI Press, Indonesia.
- Pekey, F. (2018). *Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cendrawasih*. Kompas.
- Tugas Bantuan TNI kepada Pemda, (2011).  
Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, (2015).
- Ponto, S. (2014). *Jangan Lepas Papua*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Samsudin, S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.
- Sesko TNI. (2024). *Buku Pedoman Pembuatan Tesis Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sesko TNI*. Sesko TNI.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.